

MANAJEMEN ASET DAERAH PADA KANTOR KECAMATAN DAHA UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Nor Wasilah ¹, M. Arsyad ², Arif Budiman ³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Email : norwasilah74@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa itu pengelolaan aset Kantor Masyarakat Daha-Utara dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengelolaan aset Daha-Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan daerah sudah terjalin dengan baik di Pemerintahan Daerah Utara, namun ada beberapa hal yang kurang maksimal. Dari segi fisik sudah baik karena proses pendaftaran tercatat di data RKIB dan ATISISBADA. Dari sisi situasi kepemilikan, tidak berjalan baik karena situasi pengendalian aset yang lemah. Dari segi temuan dan solusi, semuanya bagus karena pengambilan keputusan yang cerdas oleh para pembuat kebijakan. Dari segi penilaian aset, hal ini bagus karena proses penilaian dilakukan oleh tim penilai. Dalam hal penggunaan aset dengan nilai terbaik, hal ini baik karena dapat memastikan aset dengan nilai terbaik digunakan. Dari segi pengembangan strategi optimalisasi aset bagus karena sesuai dengan potensi yang ada. Tidak baik mengambil kesimpulan berdasarkan perencanaan, karena mata kuliah praktik tidak sesuai dengan tujuan yang dicapai. Dari segi evaluasi dan monitoring, hal ini bagus karena dapat menentukan keberhasilan program pengelolaan aset.

Kata Kunci : Manajemen. Aset Daerah, Kantor Kecamatan Daha Utara

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out what is the asset management of the North Daha-Community Office and what factors affect the management of North Daha-Daha assets. The results showed that regional management has been well established in the Northern Regional Government, but there are some things that are not optimal. From a physical point of view, it is good because the registration process is recorded in RKIB and ATISISBADA data. In terms of the ownership situation, it is not going well because of the weak asset control situation. In terms of findings and solutions, everything is good because of smart decision making by policy makers. In terms of asset valuation, this is good because the appraisal process is carried out by the appraisal team. In terms of using the best value assets, this is good because it can ensure the assets with the best value are used. In terms of developing an asset optimization strategy, it is good because it is in accordance with existing potential. It is not good to draw conclusions based on planning, because practical courses are not in accordance with the goals achieved. In terms of evaluation and monitoring, this is good because it can determine the success of asset management programs.

Keywords : Management. Regional Assets, Daha Utara District Office

PENDAHULUAN

Hakikat otonomi daerah merujuk pada hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengurus dan mengurus urusan-urusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Setelah penerapan otonomi daerah, pemerintah pusat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah, namun dalam beberapa kasus kewenangan pusat tetap ada, seperti urusan luar negeri, keagamaan, pertahanan dan keamanan. Dapat juga dikatakan bahwa pemerintah daerah diharapkan lebih memahami kebutuhan daerah, potensi daerah dan arah pembangunan yang akan terjadi. Selain itu, negara ini sangat besar dan ada kebutuhan untuk mendelegasikan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu mengelola dan menggunakan sumber daya yang ada secara efisien dan efektif serta mampu mengoptimalkan sumber pendapatan daerah, termasuk mengoptimalkan dan memanfaatkan bahan-bahan yang ada. Barang Milik Negara meliputi barang tidak bergerak (tanah dan bangunan) dan barang bergerak (persediaan) yang dibeli dengan APBN dan alat pembayaran lainnya yang sah, oleh badan dan lembaga pemerintah dan non pemerintah, tidak termasuk barang milik pribadi dan harta benda. Milik pemerintah daerah. Aset Daerah adalah semua aset daerah, baik yang dibeli atau diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari pembelian langsung lainnya, aset barang bergerak dan barang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya, atau barang-barang yang dapat dinilai, dalam satuan hitung atau berat. yang meliputi hewan dan tumbuhan, tidak termasuk uang dan dana lainnya (UU Menteri Desa Nomor 17 Tahun 2007). Terkait dengan pengelolaan aset daerah (BMD), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengeluarkan beberapa kebijakan kepada Menteri Dalam Negeri, diantaranya adalah Undang-Undang Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Aset Daerah (BMD). Barang Milik Daerah dan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Menerapkan prosedur pencatatan, inventarisasi dan pelaporan aset daerah. Aset atau BMD merupakan sumber daya ekonomi lokal yang mempunyai peranan dan peranan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jika dikelola dengan baik, pemanfaatan sumber daya dapat berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Dasar Daerah (PAD) dan pelayanan publik. Program ini berfokus pada administrasi pemerintahan daerah, mencakup delapan bidang, salah satunya adalah pengelolaan properti daerah. Berdasarkan peninjauan singkat penulis di Kantor Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditemukan beberapa permasalahan pengelolaan harta benda, yaitu: Misalnya tidak fokus pada persediaan karena banyak properti yang belum dicatat. Dari segi penyalahgunaan dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan sumber daya yang dilakukan tidak mencapai tujuan yang diinginkan karena banyak penerima manfaat yang menyalahgunakan sumber daya lokal yang diberikan kepada mereka.

Hasil penelitian terdahulu melibatkan dua peneliti yang berbeda dan membahas pengelolaan barang milik daerah di dua institusi yang berbeda. Penelitian pertama oleh (Supiyati, 2019) berjudul "Pengelolaan Barang Milik Daerah di Bagian Unit Penyimpanan dan Pengurus Barang Pada RSUD Pambalah Batung Amuntai." Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah di RSUD Pambalah Batung cukup baik, namun masih terdapat kekurangan dalam pengelompokan barang habis pakai dan tidak habis pakai. Penelitian kedua oleh (Prayoga, 2019) berjudul "Manajemen Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Serang." Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan aset tetap di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Serang belum berjalan dengan baik, disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia dan jumlah aset yang banyak.

Manajemen adalah seni mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan organisasi melalui penggunaan kepemimpinan.

Menurut Mary Parker Follett manajemen sebagai *“the art of getting done through people”*. Manajemen sebagai seni untuk mewujudkan tujuan-tujuan organisasi dengan menggunakan seni dalam memimpin untuk mempengaruhi orang lain. (Parker, 2017)

Menurut Peter Drucker (2017:5) manajemen dikategorikan sebagai sebuah profesi seperti halnya profesi kedokteran atau akuntan yang membutuhkan keahlian, alat, metode dan talenta tertentu, serta yang lebih penting perlu dipraktikkan di lapangan. (Drucker, 2017)

Berdasarkan penjelasan para ahli manajemen tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses yang menggunakan metode ilmiah lain, seni, pengetahuan dan pengalaman profesional untuk mencapai tujuan manajemen berdasarkan efektif dan efisien.

Menurut Doli D. Siregar menyebutkan bahwa manajemen pengelolaan aset dapat dibagi dalam lima tahapan kerja, yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, pengawasan dan pengendalian. (Siregar, 2019)

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mendefinisikan kekayaan sebagai nilai ekonomi masa depan suatu aset dan kemampuan aset tersebut secara langsung atau tidak langsung memberikan kontribusi terhadap arus kas dan ekuitas perusahaan. Aset tersebut meliputi harta benda nyata (tanah dan/atau bangunan) dan harta pribadi (berwujud dan tidak berwujud), aset/aset atau harta milik suatu perusahaan, usaha, organisasi atau orang atau harta milik perseorangan.

Siregar (2019:518) berpendapat bahwa pengelolaan sumber daya dapat dibagi menjadi lima bidang pengelolaan, yaitu pengelolaan sumber daya, penelitian hukum, pengkajian sumber daya, optimalisasi sumber daya, pengelolaan dan pengendalian. Ruang lingkup hukum saat ini adalah yurisdiksi, permasalahan hukum yang relevan, batas akhir yurisdiksi, dll. Kajian hukum merupakan bidang kegiatan pengelolaan sumber daya yang luas seperti cara, tata cara dan tata cara pengelolaan atau pengalihan sumber daya, mengidentifikasi dan mencari solusi permasalahan hukum, serta penyelesaian berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan atau pertukaran harta benda. Analisis keuangan adalah proses mengevaluasi aset yang dikelola. Telah diketahui bahwa standar akuntansi pemerintahan mewajibkan pembayaran aset daerah. Optimasi Properti adalah proses manajemen properti yang dirancang untuk memaksimalkan kondisi, lokasi, nilai, ukuran, hukum, dan finansial properti. Hasil akhir dari fase ini adalah rekomendasi tujuan, metode, dan rencana untuk mencapai keberhasilan organisasi. Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan bidang ini adalah dengan menerapkan sistem manajemen aset (SIMA). Melalui SIMA, transparansi kegiatan pengelolaan aset dapat terjamin tanpa perlu khawatir akan buruknya pengawasan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, kekayaan provinsi adalah kekayaan yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau diperoleh dari sumber lain yang sah. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Federal No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Properti Lokal, properti lokal didefinisikan sebagai: 1) Harta yang dijual atau diperoleh dengan biaya APBD 2) Barang dari sumber lain yang sah, seperti: a) Harta yang diterima dari hadiah/hadiah dan sebagainya. 3) Produk lokal adalah produk yang berasal dari negara-negara berikut: h) Semua properti di bawah kendali pemerintah Oleh karena itu, barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Menteri Nomor 17 Tahun 2007 meliputi seluruh barang milik daerah, termasuk barang bergerak dan barang tidak bergerak, serta barang milik orang lain yang terbagi di dalamnya, yang dibeli atau dibeli dari Dana APBD atau sumber lain yang sah. Hal-hal yang dapat diukur, dihitung, ditimbang, dan diukur tidak hanya mencakup hewan dan tumbuhan, tetapi juga uang dan aset lainnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana peneliti mendeskripsikan dan menganalisis situasi, peristiwa, praktik sosial, sikap dan persepsi individu dan kelompok. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif digunakan karena peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan mendalami optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal melalui pengelolaan sumber daya di Dinas Kota Doha Utara. Sumber data yaitu seluruh hasil penelitian diperoleh dari wawancara lapangan dan observasi langsung terhadap pekerja dan orang lain di wilayah penelitian. Cara penentuan informan dengan menggunakan teknik purposive sampling adalah dengan mempertimbangkan siapa saja yang dapat dijadikan informan dalam penelitian yang dilakukan. (Sugiyono, 2021)

PEMBAHASAN

Inventarisasi Aset

Inventarisasi adalah mengumpulkan data tentang barang milik daerah/negara. Aspek fisik mencakup bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat, dan lain-lain. Data ini dicatat dalam buku inventaris yang berisi informasi tentang lokasi, jenis/merk, type, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang, dan keterangan lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa inventarisasi aset di Kantor Kecamatan Doha Utara baik, meliputi tanah, gedung, ruangan, peralatan, mesin, dan fasilitas umum. Data fisik ini dicatat dalam Kartu Inventarisasi Barang (RKIB) dan Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Milik Daerah (ATISISBADA) Kantor Kecamatan Doha Utara tahun 2022. Aspek yuridis mengacu pada status penguasaan, masalah legal, batas akhir penguasaan, dan lain-lain. Pencatatan aspek yuridis berjalan dengan baik untuk mendukung pengelolaan aset yang baik dan proses inventarisasi yang valid. Hal ini sesuai dengan teori Manajemen Aset yang menyebutkan bahwa inventarisasi aset mencakup indikator aspek fisik dan yuridis.

Legal Audit

Legal audit adalah inventarisasi dan analisis status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan aset, serta mencari solusi permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan atau pengalihan aset. Masalah yang sering dihadapi dalam legal audit adalah status penguasaan yang lemah, aset yang dikuasai pihak lain, dan berbagai macam status penguasaan aset yang berbeda-beda. Kurangnya sumber daya manusia juga menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Sistem dan prosedur penguasaan aset telah dijelaskan dalam peraturan dan dianggap baik dalam Manajemen Aset Pada Kantor Kecamatan Doha Utara. Identifikasi dan solusi terhadap permasalahan legal sudah berjalan dengan baik, menghasilkan daftar aset yang dapat dikelompokkan berdasarkan status kepemilikan atau penguasaan. Kesimpulannya, legal audit penting dalam manajemen aset dan melibatkan aspek status kepemilikan, sistem dan prosedur penguasaan, serta identifikasi dan solusi permasalahan legal.

Penilaian Aset

Penilaian aset adalah proses untuk menilai aset yang dimiliki. Penilaian nilai aset barang milik daerah harus dibedakan dari penilaian umum. Penilaian nilai aset dilakukan oleh tim penilai dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti lokasi, jenis, merk, tipe, jumlah, ukuran kondisi, dan kelengkapan data lainnya. Ini sesuai dengan teori tentang manajemen aset yang menyebutkan bahwa penilaian aset adalah salah satu variabel dalam manajemen aset. Menentukan nilai aset pada dasarnya adalah perkiraan atau opini yang didukung oleh alasan atau analisis rasional. Selain itu, komunikasi antara petugas dan pengguna barang juga sangat penting dalam pengelolaan aset. Optimalisasi aset adalah proses dalam manajemen aset untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi,

nilai, jumlah/volume, legal, dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Aset daerah merupakan potensi ekonomi yang mendukung peran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pemanfaatan aset dengan nilai terbaik, pengembangan strategi untuk mengoptimalkan aset, dan pengembangan ekonomi yang rasional adalah faktor penting dalam manajemen aset. Pengembangan strategi untuk mengoptimalkan aset harus sesuai dengan potensi yang ada dan memberikan rekomendasi serta langkah lanjut untuk aset yang dapat dioptimalisasikan. Sedangkan aset yang tidak dapat dioptimalisasikan perlu dikaji dan dicari solusi pemecahannya.

Pengawasan dan Pengendalian Aset

Pengawasan dan pengendalian aset sering menjadi sorotan terhadap pemerintah daerah saat ini. Perencanaan aset merupakan proses awal dalam siklus pengelolaan aset yang bertujuan memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana. Namun, perencanaan yang kurang baik dapat mengakibatkan aset-aset terdahulu tidak tercatat. Manajemen aset dapat mencegah kerugian, tetapi tidak dapat memprediksi ancaman di masa depan, oleh karena itu harus dilengkapi dengan manajemen risiko. Pemanfaatan aset milik daerah belum berjalan dengan baik karena pelaksana tugas dan fungsi belum sesuai dengan peraturan. Monitoring program pengelolaan aset berguna untuk mengidentifikasi hambatan dan bagaimana para pelaksana program mengatasinya. Evaluasi monitoring di Kantor Kecamatan Daha Utara sudah berjalan dengan baik, namun perlu instrumen monitoring dan evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan. Supervisi dilakukan untuk memantau pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Aset Kantor Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan

1. Faktor Pendukung yakni: *Pertama*, memastikan aset terinventaris dengan benar dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan tertib fisik, serta mempermudah pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. *Kedua*, Pengukuran nilai aset yang tepat memiliki tujuan utama untuk memberikan gambaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan tentang nilai aset yang dimiliki. *Ketiga*, Evaluasi dan monitoring supervisi dilakukan sebagai tindakan/upaya untuk memantau lebih lanjut atas pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.
2. Faktor penghambat yakni: *Pertama*, sebagian aset tidak termonitor dengan baik. *Kedua*, Perencanaan dalam jangka panjang belum dapat dipastikan karena nilai aset yang berubah-ubah dan tidak menetap. *Ketiga*, Penyalahgunaan dari penerima manfaat.

SIMPULAN

Manajemen Aset Daerah di Kantor Kecamatan Daha Utara tergolong baik. Pencatatan aset secara fisik sudah baik dengan menggunakan data RKIB dan ATISISBADA. Aspek yuridis juga sudah baik dengan pendataan, kodifikasi, dan labelling sesuai Perbub HSS. Namun, status kepemilikan masih merupakan masalah karena tidak ada tanggung jawab yang cukup atas fasilitas yang disediakan pemerintah. Sistem dan prosedur pengelolaan aset sudah baik dengan menerapkan prosedur standar untuk penerimaan, penyimpanan, dan penghapusan aset serta penatausahaan aset daerah. Identifikasi masalah dan solusi sudah berjalan dengan baik dengan pengambilan keputusan yang bijak dari para pemangku kebijakan. Penilaian nilai aset juga sudah baik dengan melibatkan tim penilai. Komunikasi antara petugas dan pengguna barang juga cukup baik dalam memperkirakan serta memanfaatkan aset dengan nilai terbaik. Strategi optimalisasi aset sudah baik sesuai dengan potensi yang ada. Namun, perencanaan dan pemanfaatan aset masih perlu diperbaiki agar sesuai dengan tujuan yang dicapai dan tidak terganggu oleh pelanggaran tugas dan fungsi. Evaluasi dan monitoring sudah baik untuk melihat capaian program manajemen aset.



DAFTAR PUSTAKA

- Drucker, P.F. (2017) *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo Effendi.
- Parker, F.M. (2017) *Buku Said: Manajemen*. Jakarta: Indeks.
- Prayoga, D. (2019) *Manajemen Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Serang*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang.
- Raudah, S. and Radawiyah, R. (2023) 'Pengaruh Pengelolaan Arsip Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Pertahanan Kabupaten Balangan', *Jurnal Bisnis dan Pembangunan*, 12(1), pp. 64–72.
- Siregar, D.D. (2019) *Manajemen aset*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono, P.D. (2021) *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi Metode R&D – MPA*. Bandung: Alfabeta.
- Supiyati (2019) *Pengelolaan Barang Milik Daerah di Bagian Unit Penyimpanan dan Pengurus Barang Pada RSUD Pambalah Batung Amuntai*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.